

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kemiskinan

1. Definisi Kemiskinan

Pengertian kemiskinan memiliki berbagai makna, dalam arti sempit, kemiskinan dapat didefinisikan keadaan seseorang yang tidak memiliki uang dan barang untuk menunjang keberlangsungan hidupnya. Kemiskinan dalam Kamus Bahasa Indonesia, berasal dari kata “miskin”, yang diartikan tidak memiliki harta benda dan berpenghasilan rendah (Departemen Pendidikan, 2008:961). Secara luas kemiskinan diartikan sebuah kejadian *multiface* multidimensional. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) dan departemen sosial, kemiskinan merupakan tidak mampunya seseorang untuk memenuhi kebutuhan dasar atau primer seperti kebutuhan untuk makan dan minum. Orang atau masyarakat dikatakan miskin, jika pendapatan atau penghasilan yang ia terima dalam 1 (satu) bulan tidak sampai rata-rata pendapatan penduduk, atau pendapatan setiap bulannya di bawah garis kemiskinan (Badan Pusat Statistik, 2019:63).

Menurut John Friedman kemiskinan adalah terjadinya kekuasaan sosial yang tidak seimbang. Kekuasaan sosial dikategorikan menjadi 5 bagian; *pertama*, memiliki modal yang berkembang seperti, tanah perumahan, perlengkapan dan kesehatan. *Kedua*, memiliki sumber pendapatan contohnya, mmendapat pinjaman yang mencukupi. *Ketiga*, kelompok sosial dalam berpolitik, yang berguna untuk memenuhi kebutuhan bersama. *Keempat*, memiliki jaringan yang luas, jaringan yang luas akan memudahkan seseorang untuk mendapatkan pekerjaan atau barang-barang yang dibutuhkan. *Kelima*, mempunyai informasi tentang kondisi sekitar yang bermanfaat untuk bertahan hidup (Mujahidin dan Mahardika, 2017:15).

2. Jenis-Jenis Kemiskinan

Kemiskinan-kemiskinan yang ada di sekitar kita terdapat jenis-jenisnya, berikut ini jenis kemiskinan yakni (Khomsan, 2015:2-4):

- a. Kemiskinan absolut merupakan seseorang yan memiliki pendapatan sangat kecil atau di bawah garis kemiskinan setiap bulannya. Dan orang miskin berjenis absolut juga tidak dapat memenuhi akan kebutuhan sehari-hari misalnya,

kesehatan, sandang, pangan dan dia tidak dapat bekerja untuk memenuhi kehidupan.

- b. Jenis kemiskinan yang kedua adalah kemiskinan relative, seseorang yang termasuk dalam jenis ini disebabkan oleh pembangunan yang tidak merata, di mana pembangunan-pembangunan belum sampai di tempat atau daerah mereka. Hal ini menyebabkan kurangnya akses untuk mendapatkan pendapatan yang lebih besar, dan pendapatan masyarakat jenis ini di bawah garis kemiskinan.
- c. Miskinnya seseorang atau masyarakat disebabkan faktor kultur atau budaya. Di mana sekelompok masyarakat terlalu mengikuti kebudayaan yang tidak sesuai dengan kebudayaan asli mereka, misalnya memiliki sifat yang boros, malas bekerja dan tidak memiliki kreatifitas.
- d. Kemiskinan yang terstruktur merupakan yang disebabkan oleh tidak cakupnya SDM seseorang, atau tidak memiliki pengetahuan. SDM dan pengetahuan yang baik akan menunjang seseorang atau kelompok untuk berfikir lebih maju dan berkembang, jika terdapat kelompok yang

berkumpul pada satu tempat dengan SDM yang rendah akan menyebabkan terjadinya kemiskinan.

3. Faktor Penyebab Kemiskinan

Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya kemiskinan yang ternyata bisa berdampak serius, menurut Widiastuti (2021:23) penyebab kemiskinan meliputi faktor eksternal maupun internal sebagai berikut:

- a. Faktor eksternal diartikan sebagai faktor penyebab kemiskinan yang berasal dari luar pribadi seseorang. Contohnya pandemi, iklim yang berubah, kehidupan sosial dan kebijakan pemerintah.
- b. Faktor internal merupakan penyebab kemiskinan yang bersumber dari dalam pribadi seseorang, seperti keterbatasan fisik, bodoh, malas dan sebagainya.

Menurut Bank Dunia (2007:59-62) terdapat beberapa korelasi atau hubungan yang menyebabkan miskin:

- a. Pendidikan

Pendidikan rendah merupakan salah satu faktor yang dapat menyebabkan orang atau kelompok menjadi miskin, karena pendidikan memiliki hubungan yang erat dengan tingkat

kemiskinan. Seseorang yang memiliki pendidikan yang tinggi lebih mudah untuk mendapatkan pekerjaan dengan gaji atau upah yang besar, sementara orang dengan tingkat pendidikan yang rendah lebih susah untuk mendapatkan pekerjaan, jika dapat gaji yang akan diterima lebih sedikit dengan orang yang memiliki pendidikan yang tinggi.

b. Pekerjaan

Seseorang yang memiliki pekerjaan akan memiliki pendapatan, sebaliknya seseorang yang tidak mempunyai pekerjaan tidak akan mendapatkan apa-apa, bahkan akan menjadi beban di dalam keluarga atau kelompok. Memiliki pekerjaan dan memiliki pendapatan yang tetap setiap bulanya akan menghindarkan kita dari kemiskinan.

c. Gender

Seorang laki-laki yang menjadi kepala keluarga lebih baik dari pada perempuan yang menjadi kepala keluarga. Akan tetapi pada nyatanya tidak demikian, pada saat ini banyak perempuan yang berhasil mensejahterkan keluarganya untuk menghindari dari kemiskinan. Di daerah perkotaan rata-rata yang menjadi

kepala keluarga dmiliki pengeluaran yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan kepala keluarga perempuan yaitu 14,4%.

d. Akses terhadap pelayanan dan infrastruktur dasar

Kemudahan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dan ketersediaan infrastruktur dapat menunjang kehidupan masyarakat sekitar. Jika pada suatu kelompok tidak menerima pelayanan maka akan terasa sulit untuk bersaing dengan kelompok lainnya, apalagi infrastruktur yang tersedia tidak memadai, yang membuat masyarakat sulit untuk menjalani kehidupan atau berinteraksi dengan kelompok lain. Jika infrastruktur tersedia masyarakat dapat melakukan kegiatan jual beli dengan masyarakat yang berada di daerah lain.

e. Lokasi geografis

Posisi atau letak geografis suatu daerah berdampak akan tingkat kemiskinan, geografis daerah terpencil biasanya memiliki tingkat kemiskinan yang tinggi. Indonesia merupakan negara yang luas, masih banyak daerah-daerah yang tertinggal, seperti, pendidikan, pelayanan keshatan dan infrastruktur jalan yang masih rusak berat. Salah satu cara untuk mengurangi

tingkat kemiskinan adalah, dengan cara memperbaiki infrastruktur di daerah-daerah terpencil.

Faktor-faktor penyebab kemiskinan menurut Nugroho (2020:12) semakin banyak anggota keluarga yang tidak memiliki pendapatan akan menimbulkan kemiskinan dikarenakan tuntutan atau beban untuk hidup yang harus dipenuhi.

B. Indeks Pembangunan Manusia

1. Pengertian Pengertian Indeks Pembangunan Manusia

Sumber daya manusia (SDM) memiliki peran yang sangat krusial dalam suatu pembangunan kualitas hidup manusia. Semakin baik kualitas SDM seseorang atau daerah maka akan berpengaruh pada perkembangan pembangunan manusia disuatu daerah. Salah satu cara untuk mengetahui berhasil atau tidaknya pembangunan, dapat diukur dengan indeks pembangunan manusia (IPM) (Sudarmanto et al., 2020:66). Peningkatan indeks pembangunan manusia dapat dilihat dari beberapa aspek yaitu, mutu pendidikan, tingkat kesehatan, dan pertumbuhan ekonomi. Aspek-aspek tersebut merupakan satu kesatuan yang saling berhubungan. Maka ketiga aspek tersebut harus selalu menjadi pertimbangan untuk meningkatkan kualitas SDM (Widodo, 2021:68).

IPM menurut Sahban (2018:48) merupakan perhitungan pada IPM dapat dilihat dari harapan hidup, melek huruf pendidikan, dan standarisasi hidup. Berkembangnya atau mundurnya suatu negara dapat diukur dengan menggunakan IPM, semakin baik nilai IPM pada suatu negara merupakan cerminan bagi negaranya. Selain itu ekonomi merupakan unsur yang tidak dapat dilepaskan dengan pembangunan manusia.

Terdapat 3 (tiga) dimensi dasar dalam pembangunan manusia untuk mengukur pencapaian rata-rata sebuah negara (Sahban, 2018:48):

- a. Hidup sejahtera dengan tingkat kesehatan yang baik dengan masa hidup atau umur yang panjang saat dilahirkan.
- b. Mengukur tingkat pengetahuan dengan cara melihat kondisi pendidikan yang dapati, dan dapat membaca atau dapat menulis dan melek huruf angka.
- c. Memiliki standar kehidupan yang layak, dan diukur dengan GDP atau produk domestik bruto.

2. Perhitungan Indeks Pembangunan Manusia

Perhitungan indeks pembangunan manusia di Indonesia dihiitung secara resmi oleh Badan Pusat Statistik (BPS) untuk

kepentingan pemerintah. Dengan data IPM, pemerintah bisa menentukan suatu keputusan dan kebijakan pembangunan yang lebih baik dan tersusun secara sistematis. Terdapat rumus dalam perhitungan IPM, sebagai standar yang telah ditetapkan seperti nilai tertinggi dan nilai terendah. Berikut rumus perhitungan IPM (Widodo, 2021:70-71):

a. Dimensi Kesehatan

$$I_{kesehatan} = \frac{AHH - AHH_{min}}{AHH_{maks} - AHH_{min}}$$

b. Dimensi Pendidikan

$$I_{HLS} = \frac{HLS - HLS_{min}}{HLS_{maks} - HLS_{min}}$$

$$I_{RLS} = \frac{RLS - RLS_{min}}{RLS_{maks} - RLS_{min}}$$

$$I_{pendidikan} = \frac{I_{HLS} + I_{RLS}}{2}$$

c. Dimensi Pengeluaran

$$I_{pengeluaran} = \frac{\ln(pengeluaran) - \ln(pengeluaran_{min})}{\ln(pengeluaran_{maks}) - \ln(pengeluaran_{min})}$$

d. Menghitung IPM

IPM dihitung sebagai rata-rata geometrik dari indeks kesehatan, pendidikan, dan pengeluaran.

$$IPM = \sqrt[3]{I_{kesehatan} \times I_{pendidikan} \times I_{pengeluaran}} \times 100$$

3. Klasifikasi Indeks Pembangunan Manusia

Tabel 2.1
Klasifikasi Status Indeks Pembangunan Manusia

Nilai IPM	Status Pembangunan Manusia
< 60	Rendah
< 60 IPM < 70	Sedang
$70 \leq \text{IPM} < 80$	Tinggi
≥ 80	Sangat Tinggi

Sumber: Badan Pusat Statistik (2021)

4. Manfaat Indeks Pembangunan Manusia

Terdapat beberapa manfaat dalam IPM yaitu:

- a. IPM bermanfaat untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat atau penduduk di suatu daerah.
- b. Nilai IPM dapat menentukan berhasil atau tidaknya pembangunan di suatu daerah.
- c. Untuk negara kita Indonesia, nilai dari IPM digunakan pemerintah dalam menetapkan strategi penentuan dana alokasi umum. Dan mengukur keberhasilan ekonomi penduduk.

C. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

1. Pengertian Produk Domestik Regional Bruto

Produk Domestik Bruto (PDB) pada tingkat nasional serta Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada tingkat regional (Provinsi) mendeskripsikan kekuatan suatu daerah demi membuat nilai lebih pada suatu masa tertentu. Penyusunan PDRB dapat difungsikan melalui 2 cara, yaitu lapangan usaha dan pengeluaran. Kedua cara tersebut memberikan komposisi data nilai tambah dirinci berdasarkan sumber penghasilan atau rangkaian ekonomi (usaha) berdasarkan komponen penggunaannya. Dilihat dari sisi lapangan, PDRB merupakan perhitungan semua komponen nilai tambah bruto yang dapat dibuatkan oleh sektor-sektor ekonomi berdasarkan kegiatan produksinya. Dalam hal pengeluaran menerangkan tentang pemakaian berdasarkan nilai tambah (Badan Pusat Statistik, 2019:241-242).

PDRB dapat dihitung melalui tiga pendekatan, hal tersebut dapat dilihat sebagai berikut (Bps.go.id, 2021):

a. Pendekatan Produksi

PDRB merupakan total nilai tambah berdasarkan barang dan jasa yang didapatkan oleh berbagai unit produksi di suatu wilayah

atau daerah dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun).

Dalam publikasinya pendekatan produksi disajikan dalam kategori lapangan usaha, yaitu:

- 1) Perkebunan dan perikanan
- 2) Tambang atau galian
- 3) pabrik pengolahan
- 4) penyedia listrik dan gas
- 5) Penyediaan air bersih, bank sampah dan pengolahan B3
- 6) Penyediaan jasa pembangunan
- 7) Jual beli secara besar (agen) dan kecil (eceran), reparasi kendaraan roda dua ataupun roda empat
- 8) Penyedia penyewaan transportasi dan gudang
- 9) Penyediaan perlengkapan dan kebutuhan pangan
- 10) Penyedia jaringan telekomunikasi (telepon dan internet)
- 11) Penyedia jasa keuangan (gadai, asuransi, investasi dan lain-lain)
- 12) Hunian atau tempat tinggal
- 13) Penyedia jasa perusahaan (UD, CV dan PT) dan lain-lain.

b. Pendekatan Pendapatan

PDRB ialah jumlah imbalan jasa baik berupa upah maupun tunjangan yang diterima oleh seseorang bekerja dalam proses produksi pada suatu tempat dalam jangka waktu tertentu (tahunan).

c. Pendekatan Pengeluaran

PDRB ialah setiap komponen permohonan akhir terdiri dari:

- 1) Setiap pembiayaan yang dikeluarkan yang berasal dari rumah tangga dan lembaga atau organisasi yang tidak bersifat komersil.
- 2) Pembiayaan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah.
- 3) Pembentukan modal tetap domestik bruto.
- 4) Merubah inventaris atau barang-barang yang dimiliki.
- 5) Keuntungan bersih dari penjualan produk ke luar negeri.

2. Kegunaan Data PRDB

Data yang dihasilkan dari PDRB dapat digunakan sebagai indicator ekonomi dalam skala makro atau besar, yang diperoleh setiap tahunnya. Adalah salah satu indikator ekonomi makro yang dapat menunjukkan kondisi perekonomian daerah setiap tahun.

Menurut Badan Pusat Statistik terdapat kegunaan data PDRB setiap tahunnya, berikut kegunaan dari data PDRB (Bps.go.id, 2021):

- a. PDRB atas dasar harga berlaku (nominal), mendeskripsikan kemampuan kekuatan ekonomi yang diperoleh oleh suatu daerah. Semakin besar nilai PDRB mencerminkan bahwa suatu daerah memiliki sumber kekuatan ekonomi yang kuat.
- b. PDRB atas dasar harga konstan (riil), berguna untuk mendeskripsikan perkembangan atau pertumbuhan ekonomi suatu daerah secara menyeluruh setiap tahunnya.
- c. Pendistribusian nilai PDRB atas dasar harga berlaku, kegiatan usaha yang berjalan baik suatu daerah mempunyai dampak yang besar bagi ekonomi daerah, semakin baik peran kegiatan usaha di suatu daerah, maka semakin kuat ekonomi masyarakat.
- d. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku, mencerminkan pendapatan yang diperoleh setiap orang yang tinggal di suatu daerah.
- e. PDRB per kapita atas dasar harga konstan, memiliki tujuan untuk mencerminkan perkembangan ekonomi setiap orang di suatu daerah.

D. Pengeluaran Pemerintah

1. Definisi dan Fungsi Pengeluaran Pemerintah

Pengeluaran pemerintah adalah uang yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah untuk dibelanjakan kebutuhan bagi masyarakat, biasanya pengeluaran pemerintah dipergunakan untuk membeli atau membangun fasilitas-fasilitas penunjang untuk masyarakat seperti, pendidikan, kesehatan, gaji pegawai dan bantuan lainnya yang telah dianggarkan dalam APBD/APBN. (Sukirno, 2015:168).

Pengeluaran pemerintah dalam kamus ekonomi didefinisikan sebagai pengeluaran dan investasi dari pemerintah pusat dan daerah untuk menyediakan barang-barang sosial (*sosial goods*) dan jasa-jasa (kesehatan, pendidikan, pertahanan/keamanan, jalan raya dan lain sebagainya, dan biaya sosial untuk pengangguran, pensiun dan lain sebagainya (*transfer payment*). Perkembangan pengeluaran pemerintah dalam pembangunan ekonomi terdiri dari tiga tahap, yaitu (Siregar et al., 2021:60):

- a. Pada tahap awal pemerintah melakukan investasi besar untuk menyediakan fasilitas seperti pendidikan dan kesehatan.

- b. Kemudian tahap menengah, melakukan investas untuk perkembangan dan pertumbuhan ekonomi daerah, dan modal investasi ditambahkan oleh investor swasta atau asing.
- c. Tahap lanjut, berfungsi untuk membantu kegiatan-kegiatan sosial dalam program kesejahteraan, seperti bantuan tunai, bantuan sembako bahkan sampai bantuan untuk rehap rumah penduduk yang tidak layak untuk dihuni.

2. Jenis-Jenis Pengeluaran Pemerintah

Pengeluaran pemerintah pusat bisa diartikan sebagai pembelanjaan atau pengeluaran pemerintah yang telah dianggarkan sebelumnya untuk membiayai kegiatan pemerintahan, pemerintah tidak hanya mengaggarkan untuk belanja bagi pegawai saja, tetapi pemerintah juga menggarkan untuk kesejahteraan masyarakat. Berikut ini adalah jenis-jenis pengeluaran pemerintah (Anggara, 2016:90):

- a. Belanja Pemerintah Pusat

Pengeluaran rutin:

- 1) Belanja pegawai, terdiri dari pengeluaran untuk memberi gaji atau upah para pegawai yang bekerja dan pegawai yang sudah tidak bekerja (pesiun) dan lain-lain.
- 2) Belanja barang meliputi pembelian perlengkapan kegiatan pemerintahan, belanja pemerintahan dapat dibeli di dalam negeri ataupun barang dari luar negeri.
- 3) Pembayaran bunga utang ialah semua pembelanjaan yang dikeluarkan untuk membayar hutang dengan cara mencicil atau dapat membayar bunga hutang.
- 4) Subsidi diperuntukan bagi masyarakat, subsidi dapat disalurkan untuk BBM atau selain BBM seperti biaya listrik, harga pokok makanan dan lainnya.

b. Pengeluaran Pembangunan

- 1) Pengeluaran dari segi pembangunan terbagi menjadi dua, yaitu: Pembangunan fisik dan Pembangunan non fisik.
- 2) Pengeluaran dari segi pembiayaan, pengeluaran pembangunan terdiri dari: Pembiayaan rupiah (Tabungan pemerintah dan Pinjaman program) dan Pembiayaan proyek

c. Belanja Pemerintah Daerah

- 1) Dana Perimbangan terdiri dari Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Alokasi Umum.
- 2) Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian

E. Dana Zakat

1. Pengertian Zakat

Secara istilah kata zakat berasal dari bahasa Arab, (*zakah* atau *zakat*), yang memiliki makna harta tertentu yang harus (wajib) dikeluarkan oleh orang Muslim untuk diberikan kepada mustahik (fakir miskin dan sebagainya). Secara bahasa “zakat” bermakna “bersih, suci, subur, berkat, dan berkembang”. Dalam syariat Islam, zakat merupakan rukun ketiga dari rukun Islam (Rosadi, 2019:19).

Secara terminologi fiqh, secara umum zakat didefinisikan sebagai bagian tertentu dari harta kekayaan yang diwajibkan Allah SWT untuk para mustahik atau orang yang berhak menerimanya. Mahmud Syaltut, selaku seorang ulama kontemporer dari Mesir, mendefinisikan sebagai ibadah kebendaan yang diwajibkan oleh Allah SWT agar orang kaya menolong orang yang miskin berupa suatu yang dapat memenuhi kebutuhan pokoknya (Abror, 2018:1-2).

Zakat di negara kita Indonesia telah diartikan secara resmi dalam ketentuan undang-undang sebagai harta yang wajib disisihkan oleh seorang Muslim atau badan yang dimiliki orang Muslim dengan ketentuan ajaran agama Islam, kemudian diberikan kepada mustahik. pengertian tersebut serupa dengan pendapat yang telah disepakati oleh empat mazhab, yaitu mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi, dan mazhab Hambali. menurut Yusuf Qardawi zakat merupakan mengeluarkan bagian tertentu dari harta yang dimiliki dan diserahkan kepada mustahik (Saprida, 2015: 172).

Berdasarkan definisi-definisi tentang zakat yang dikemukakan oleh beberapa ahli sebelumnya, dapat penulis simpulkan secara bahasa zakat memiliki arti suci berkah dan berkembang. Sedangkan menurut istilah zakat merupakan harta yang wajib dikeluarkan oleh orang kaya atau telah sampai nisabnya, dan dibagikan untuk para mustahik yang dikelola melalui amil. Para ulama telah sepakat bahwa zakat wajib ditunaikan untuk orang Islam untuk menjalankan perintah agama dalam ajaran Islam untuk menghilangkan atau membersihkan dosa-dosa.

2. Kedudukan Zakat

Berbicara tentang zakat, sesungguhnya memperbicarakan hubungan antar manusia (kemanusiaan). Suatu kenyataan bahwa manusia diciptakan dalam keadaan yang tidak sama. Ada yang kaya dan ada yang miskin. Yang miskin nenerlukan orang kaya, dan yang kaya memerlukan orang miskin, ini berarti adanya hubungan timbal balik. Ditinjau dari segi lafaz, kata zakat disebutkan sebanyak 32 (tiga puluh dua) kali mengikuti kata sahalat di dalam Al-Qur'an. Sebagai contoh seperti dalam surat Al-Baqarah ayat 43 dan surat At-Taubah ayat 5 (Ismail et al., 2018:9):

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ٤٣

Artinya:

Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku' (Q.S, Al-Baqarah: 43).¹

فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ١١

Artinya:

Jika mereka bertaubat, mendirikan sholat dan menunaikan zakat, maka (mereka itu) adalah saudara-saudaramu seagama. Dan Kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi kaum yang mengetahui (Q.S, At-Taubah: 11)²

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan Artinya*. (Yogyakarta: UII Press, 2021), h. 16.

² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan,*, h. 279.

Berdasarkan firman Allah SWT di atas bahwa, dapat disimpulkan bahwa kewajiban zakat dalam Islam, sama kedudukannya dengan kewajiban shalat atau rukun Islam yang lainnya. Sebab. Zakat merupakan bagian dari rukun Islam, yang mesti ditunaikan oleh setiap Muslim dengan persyaratan tertentu untuk diberikan kepada kelompok tertentu pula (mustahik) (Ismail et al, 2018:25).

3. Penyaluran Dana Zakat

Penerima zakat tiadalah sembarangan. Golongan yang menerima zakat sudah diatur dalam Al-Quran. Golongan ini dikenal dengan istilah delapan asnaf, sebagaimana firman Allah SWT dalam surat At-Taubah ayat 60 yang berbunyi:

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا
وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ
السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ٦٠ ﴾

Artinya:

Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana (Q.S At-Taubah: 60).³

³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan,*, h. 288.

Berdasarkan firman Allah SWT di atas, maka orang-orang yang berhak menerima zakat adalah sebagai berikut (Hamka, 2013:62):

- a. Fakir merupakan orang yang tidak memiliki apapun, seseorang dikatag fakir apabila tiak memiliki harta benda untuk dihadalakan, selain iitu ia tidak mempunyai tenaga untuk melakukan pekerjaan sehigga kebutuhan sehari-hari tidak bisa didapati.
- b. Miskin, seseorang yang dapat dikatakan miskin ialah orang yang selelu mengalami kekurangan walaupun ia sudah bekerja, hal tersebut dikarenakan gaji yang ia terima tidak cukup untuk membeli kebutuhan dasar.
- c. Amil ialah seseorang yang bertugas menghimpun zakat dari muzaki dan mendstibusikan zakat kepada mustahik, biasanya amil ditunjukkan oleh lembaga zakat yang memiliki otoritas tinggi, atau orang-orang yang dianggap mampu melaksanakan tugas tersebut.
- d. *Muallaf* ialah seseorang yang hatinya telah dibuka untuk memeluk agama Islam, *muallaf* diberikan zakat agar ia merasakan ketenangan dalam menjalankan kehidupannya sebagai orang Muslim.

- e. *Riqab* atau yang dapat disebut *mukatab* adalah seorang budak yang telah dimerdekakan oleh tuannya. Seorang *riqab* jika ia telah merdeka maka harus diberi zakat, mengingat ia masih dalam golongan yang kurang mampu, pada zaman sekarang tidak kita temukan seorang budak, pada saat ini perbudakan sudah tidak ada lagi.
- f. *Gharimin* merupakan seseorang yang mempunyai hutang, di mana hutang tersebut dimanfaatkan untuk kepentingan dalam menjalankan kehidupan sehari-hari untuk memenuhi kebutuhan dasar. Uang yang didapatkan dari hasil hutang tidak boleh dipakai untuk melakukan perbuatan maksiat, jika terdapat *gharimin* yang melakukan hal demikian maka ia tidak layak untuk menerima zakat.
- g. *Fi Sabilillah* ialah seseorang yang sedang melakukan perjalanan di jalan Allah SWT, biasanya orang yang dapat dikatakan *fi sabilillah* adalah orang Islam yang berjuang dan belajar untuk menuntut ilmu agama, atau orang Islam yang pergi berperang untuk membela negara.
- h. *Ibnu Sabil* ialah seseorang yang sedang melakukan perjalanan (musafir), yang dimaksudkan dengan perjalanan

ialah perjalanan untuk menegakan Agama Islam, bukan perjalanan untuk melakukan perbuatan maksiat yang menyebabkan dosa. Contoh perjalanan ibnu sabil adalah melakukan ziarah ke makam para ulama atau wali Allah, melakukan silaturahmi dan berkunjung ke dunia pendidikan Islam seperti pesantren atau majelis ilmu Islam.

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini dilakukan berdasarkan hasil literatur pembahasan dari hasil penelitian terdahulu, walaupun memiliki persamaan dengan para peneliti terdahulu, akan tetapi terdapat beberapa perbedaan penelitian ini dengan peneliti sebelumnya. Dalam penelitian ini penulis menggunakan 7 (tujuh) hasil penelitian terdahulu, yang penulis jadikan referensi dan teori agar saling melengkapi. Berikut ini hasil penelitian terdahulu:

Tabel 2.2
Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian
1	Putri et al., (2020)	<ul style="list-style-type: none"> - Zakat - Jumlah Penduduk Miskin 	<ul style="list-style-type: none"> - PDRB - Pengeluaran Pemerintah - Subjek Penelitian 	<p>Dana zakat terhadap tingkat kemiskinan. Dapat disimpulkan bahwa pendistribusian dana zakat dapat diimplementasikan sebagai pengurang angka kemiskinan.</p>
2	Permatasari (2021)	<ul style="list-style-type: none"> - Zakat - IPM - Tingkat Kemiskinan - Pertumbuhan Ekonomi - PDRB 	<ul style="list-style-type: none"> - Pengeluaran Pemerintah - Pendapatan Perkapita - Intervening - Subjek Penelitian 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dana Zakat, IPM, dan kemiskinan, dan pendapatan perkapita berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. 2. IPM berpengaruh positif terhadap PDRB 3. Melalui pendapatan perkapita bahwa Zakat dan IPM

No	Peneliti	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian
				berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.
3	Soleh dan Wahyuni (2021)	<ul style="list-style-type: none"> - IPM - Jumlah Penduduk Miskin - PDRB - Pengeluaran Pemerintah 	- Subjek Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> 1. IPM berpengaruh negatif terhadap kemiskinan. 2. PDRB dan pengeluaran pemerintah memiliki pengaruh positif terhadap kemiskinan. 3. Dana zakat dapat memoderasi pengeluaran pemerintah terhadap kemiskinan 4. Dana zakat tidak dapat memoderasi IPM dan PDRB terhadap kemiskinan.
4	Baihaqi dan Puspitasari (2020)	<ul style="list-style-type: none"> - IPM - Zakat - Kemiskinan - PDRB 	<ul style="list-style-type: none"> - Pengeluaran Pemerintah - Subjek Penelitian 	1. Kenaikan 1% pada ZIS dan PDRB berkontribusi menurunkan kemiskinan sebesar 1.2

No	Peneliti	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian
				<p>dan 3.3 satuan.</p> <p>2. Kenaikan 1% pada pengangguran dan IPM berkontribusi menurunkan angka kemiskinan sebesar 0.1 dan 0.2 satuan.</p>
5	Amri (2019)	<ul style="list-style-type: none"> - Zakat - Tingkat Kemiskinan 	<ul style="list-style-type: none"> - Kerja - Belanja Pemerintah - PDRB - Subjek Penelitian 	Penerimaan zakat berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan.
6	Sudirman dan Sakinah (2020)	<ul style="list-style-type: none"> - IPM - Kemiskinan 	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah Penduduk Usia Produktif - Angkatan Kerja - Zakat - PDRB - Pengeluaran Pemerintah - Subjek Penelitian 	Hasil penelitian menunjukkan bahwa, IPM memiliki pengaruh terhadap penurunan angka kemiskinan.
7	Afriyanti (2021)	<ul style="list-style-type: none"> - Zakat Produktif - Tingkat Kemiskinan 	<ul style="list-style-type: none"> - IPM - Pengeluaran Pemerintah - PDRB - Pendapatan Rumah 	Adanya perubahan kondisi kemiskinan rumah tangga mustahik

No	Peneliti	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian
			Tangga	berdasarkan model CIBEST setelah adanya bantuan zakat produktif BAZNAS Kota Pariaman.

G. Hubungan Antar Variabel

1. Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Tingkat Kemiskinan

Indeks pembangunan manusia (IPM) merupakan perhitungan pada IPM dapat dilihat dari harapan hidup, melek huruf pendidikan, dan standarisasi hidup. Berkembangnya atau mundurnya suatu negara dapat diukur dengan menggunakan IPM, semakin baik nilai IPM pada suatu negara merupakan cerminan bagi negaranya. Selain itu ekonomi merupakan unsur yang tidak dapat dilepaskan dengan pembangunan manusia (Sahban, 2018:48). Menurut Tahir et al., (2021:59) nilai IPM yang rendah menyebabkan rendahnya tingkat produktivitas pekerjaan suatu penduduk. Rendahnya angka kerja suatu daerah berdampak pada angka kemiskinan yang dapat meningkat setiap tahunnya.

2. PDRB Terhadap Tingkat Kemiskinan

Menurut Badan Pusat Statistik, (2019:241-242) Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) mencerminkan kekuatan suatu daerah untuk membuat nilai tambah pada waktu tertentu. Mengkonsep PDRB dapat digunakan dengan 2 pendekatan, yaitu lapangan usaha dan pengeluaran. Kedua cara tersebut memberikan komposisi data nilai tambah dirinci berdasarkan sumber penghasilan atau rangkaian ekonomi (usaha) berdasarkan komponen penggunaannya. Dilihat dari sisi lapangan, PDRB merupakan perhitungan semua komponen nilai tambah bruto yang dapat dibuatkan oleh sektor-sektor ekonomi berdasarkan kegiatan produksinya. Dalam hal pengeluaran menerangkan tentang pemakaian berdasarkan nilai tambah. Menurut Silaban et al., (2020:316) angka kemiskinan dapat menurun jika angka PDRB setiap tahunnya mengalami kenaikan terus menerus.

3. Pengeluaran Pemerintah Terhadap Tingkat Kemiskinan

Menurut Sukirno (2015:168) uang yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah untuk dibelanjakan kebutuhan bagi masyarakat, biasanya pengeluaran pemerintah dipergunakan untuk membeli atau membangun fasilitas-fasilitas penunjang untuk masyarakat seperti,

pendidikan, kesehatan, gaji pegawai dan bantuan lainnya yang telah dianggarkan dalam APBD/APBN.

Menurut Anggraini dan Muchtolifah (2022:89) uang yang dikeluarkan pemerintah bertujuan untuk mensejahterakan penduduk daerahnya, uang yang dikeluarkan oleh pemerintah sudah dianggarkan sebelumnya, agar pengeluaran pemerintah tepat sasaran dan sesuai dengan tujuannya, peran badan pengawas keuangan sangat diperlukan, karena uang yang dianggarkan tidak hanya untuk kepentingan pegawai saja seperti gaji atau fasilitas penunjang, akan tetapi dalam anggaran tersebut terdapat biaya untuk mengsejahterakan rakyat.

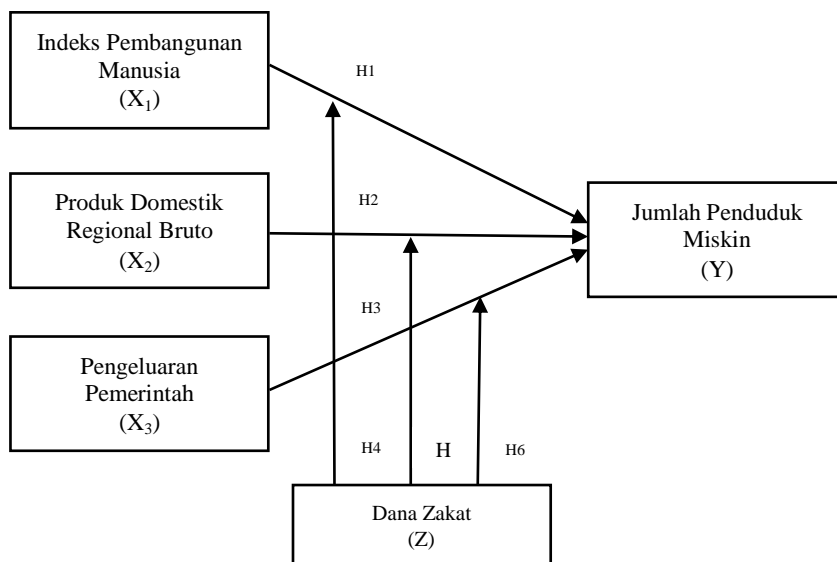
4. Dana Zakat Terhadap Tingkat Kemiskinan

Dana zakat merupakan dana yang dihimpun dari para muzakki, zakat dikelola oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Dalam agama Islam memiliki hukum yang hamper setara dengan mendirikan shalat karena hukum menunaikan zakat adalah wajib bagi yang mampu. Fungsi zakat untuk menangani kemiskinan sudah terkonsep sejak agam Islam dating, karena dana zakat diperuntukan oleh orang fakir, miskin dan golongan lainnya. (Alfi et al., 2020:9).

Menurut (Harahap, 2022:28) zakat memiliki peran yang sangat penting di bidang ekonomi dan kesejahteraan. Jika dana zakat didistribusikan dengan cara produktif kepada orang-orang yang berhak (mustahik) tidak menutup kemungkinan dapat menurunkan angka kemiskinan. Zakat yang bersifat produktif dapat membantu mustahik untuk mendirikan usaha kecil-kecilan seperti UMKM atau sejenisnya. Dari hasil berjualan para mustahik akan mendapatkan keuntungan untuk membeli kebutuhan dasar sehari-hari, sehingga ia tidak merepotkan orang lain lagi untuk meminta bantuan uang atau makan.

H. Kerangka Pemikiran Penelitian

Berdasarkan konsep kajian pustaka, hasil penelitian terdahulu dan hubungan antar variabel yang telah dibahas sebelumnya, maka variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari indeks pembangunan manusia (IPM) disimbolkan dengan (X_1), produk domestik regional bruto (PDRB) disimbolkan dengan (X_2) dan pengeluaran pemerintah disimbolkan dengan (X_3). Variabel moderasi adalah dana zakat disimbolkan dengan (Z). Variabel terikat adalah jumlah penduduk miskin di Kota Serang disimbolkan dengan (Y). Berikut ini gambar kerangka pemikiran penelitian ini:



Gambar 2.1

Kerangka Pemikiran Penelitian

Keterangan:

X = Variabel Bebas

Z = Variabel Moderasi

Y = Variabel Terikat

H = Hipotesis

Berdasarkan gambar kerangka pemikiran di atas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah, untuk mengetahui bagaimana pengaruh IPM, PDRB dan pengeluaran pemerintah secara parsial mempengaruhi jumlah penduduk miskin di Kota Serang. Selanjutnya bagaimana kemampuan variabel dana zakat memoderasi pengaruh IPM, PDRB dan

pengeluaran pemerintah terhadap jumlah penduduk miskin di Kota Serang.

I. Hipotesis Penelitian

Hipotesis adalah jawaban sementara dalam sebuah penelitian yang telah dirumuskan permasalahannya. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan hanya berdasarkan dengan teori mumpuni, belum berdasarkan hasil temuan-temuan dilapangan (Purba, 2021:65). Hipotesis dalam penelitian ini untuk mengetahui pengaruh indeks pembangunan manusia (X_1) produk domestik regional bruto (X_2) dan pengeluaran pemerintah (X_3) terhadap perubahan jumlah penduduk miskin (Y) dengan dana zakat (Z) sebagai variable moderasi.

H1: Indeks pembangunan manusia berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Kota Serang Tahun 2016-2020.

H2: PDRB berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Kota Serang Tahun 2016-2020.

H3: Pengeluaran pemerintah berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Kota Serang Tahun 2016-2020.

H4: Dana zakat mampu memoderasi pengaruh indeks pembangunan manusia terhadap tingkat kemiskinan di Kota Serang Tahun 2016-2020.

H5: Dana zakat mampu memoderasi pengaruh PDRB terhadap tingkat kemiskinan di Kota Serang Tahun 2016-2020.

H6: Dana zakat mampu memoderasi pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap tingkat kemiskinan di Kota Serang Tahun 2016-2020.